



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA  
Nomor: 992 /Kep/D/FH/VIII/2021**

**T e n t a n g**

**PEMBERLAKUAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA**

---

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk menciptakan lulusan yang siap menghadapi perkembangan ilmu dan teknologi yang pesat sesuai dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan, maka perlu melakukan penyesuaian kurikulum pendidikan yang merdeka bagi dengan mengakomodir metode pembelajaran yang inovatif;
- b. bahwa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila memiliki otonomi keilmuan dan pengembangan metode pembelajaran untuk mengakomodir hak Mahasiswa belajar 3 (tiga) semester di luar program studi sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana ditentukan melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor Universitas Pancasila;
- c. bahwa Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila telah melakukan beberapa kegiatan namun tidak dikerangkai oleh Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sehingga tidak dapat dikonversi dan direkognisi sebagai kegiatan pembelajaran dalam penghitungan sistem kredit semester;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian kurikulum dengan mengakomodir hak Mahasiswa belajar 3 (tiga) semester di luar program studi sebagai salah satu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

**Mengingat :**

1. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 325/U/1994 tentang Kurikulum Yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana Hukum;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

*te*

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 072/YPPUP/UP/VII/2015 tentang: Statuta Universitas Pancasila
8. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 747/Kep.R/UP/1999 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Operasional;
9. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 03/Per.R/UP/VI/2020 tentang Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Pancasila;
10. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 04/Per.R/UP/VI/2020 tentang Petunjuk Teknis Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pancasila.
11. Peraturan Rektor Nomor 05/PER.R/UP/VI/2020 tentang Pengakuan (Rekognisi) Kegiatan Kemahasiswaan Menjadi Satuan Kredit Semester belum mengatur mengenai pengakuan (rekognisi) pada kegiatan kemahasiswaan;
12. Keputusan Rektor Universitas Pancasila Nomor: 084/R/UP/I/2021 tentang Mata Kuliah Wajib Nasional dan Mata Kuliah Wajib Universitas;
13. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Nomor: 457/D/FH/III/2016 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Rapat Tim Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka tertanggal 27 Oktober 2020;
2. Hasil konsinyering Tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan pimpinan Universitas Pancasila tertanggal 5 November 2020;
3. Hasil Monitoring dan Evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas Kinerja Tim MBKM tertanggal 23 November 2020;
4. Pertimbangan Rapat Senat Fakultas tanggal 18 Desember 2020

**Memutuskan**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberlakukan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- Kedua :** Kurikulum sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan penyempurnaan Kurikulum sebelumnya yang berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
- Ketiga :** Ketentuan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- Keempat :** Kurikulum sebagaimana dimaksud keputusan ini pada diktum Kesatu mulai diberlakukan kepada Mahasiswa Angkatan 2021/2022;
- Kelima :** Bagi Mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan sebelumnya tetap melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum sebelumnya, kecuali terdapat hal-hal yang ditentukan lain sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan;



**Keenam** Keputusan ini mulai berlaku pada Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022;

**Ketujuh** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2021

Dekan,



**Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.**

Salinan Keputusan ini  
Disampaikan kepada yth:

1. Rektor
2. Para Wakil Dekan FHUP
3. Para Kepala Bagian;
4. Para Ketua Bagian;
5. Para Dosen;
6. Arsip

## MATA KULIAH WAJIB NASIONAL DAN MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

### 1. MATA KULIAH WAJIB NASIONAL

1. **Pancasila** dari Mata Kuliah Wajib Universitas menjadi Mata Kuliah Wajib Nasional
  - 1.1 Mata Kuliah **Pancasila** dalam Kurikulum Baru merupakan Mata Kuliah Wajib Nasional
  - 1.2 Bagi mahasiswa angkatan 2020/2021 dan angkatan tahun sebelumnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 1.2.1 Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Pancasila** berarti telah lulus mata kuliah **Pancasila** sebagai mata kuliah wajib Universitas dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Pancasila** sebagai mata kuliah wajib Nasional dalam Kurikulum Baru.
    - 1.2.2 Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Pancasila** berarti wajib menempuh mata kuliah **Pancasila** sebagai mata kuliah wajib Nasional dalam Kurikulum Baru.
2. **Agama** dari Mata Kuliah Wajib Universitas menjadi Mata Kuliah Wajib Nasional
  - 2.1 Mata Kuliah **Agama** dalam Kurikulum Baru merupakan Mata Kuliah Wajib Nasional
  - 2.2 Bagi mahasiswa angkatan 2020/2021 dan angkatan tahun sebelumnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 2.2.1 Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Agama** berarti telah lulus mata kuliah **Agama** sebagai mata kuliah wajib Universitas dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Agama** sebagai mata kuliah wajib Nasional dalam Kurikulum Baru.
    - 2.2.2 Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Agama** berarti wajib menempuh mata kuliah **Agama** sebagai mata kuliah wajib Nasional dalam Kurikulum Baru.
3. **Kewarganegaraan** dari Mata Kuliah Wajib Universitas menjadi Mata Kuliah Wajib Nasional
  - 3.1 Mata Kuliah **Kewarganegaraan** dalam Kurikulum Baru merupakan Mata Kuliah Wajib Nasional
  - 3.2 Bagi mahasiswa angkatan 2020/2021 dan angkatan tahun sebelumnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 3.2.1 Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Kewarganegaraan** berarti telah lulus mata kuliah **Kewarganegaraan** sebagai mata kuliah wajib Universitas dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Kewarganegaraan** sebagai mata kuliah wajib Nasional dalam Kurikulum Baru.
    - 3.2.2 Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Kewarganegaraan** berarti wajib menempuh mata kuliah **Kewarganegaraan** sebagai mata kuliah wajib Nasional dalam Kurikulum Baru.

4. **Bahasa Indonesia** dari Mata Kuliah Wajib Universitas menjadi Mata Kuliah Wajib Nasional
  - 4.1 Mata Kuliah **Bahasa Indonesia** dalam Kurikulum Baru merupakan Mata Kuliah Wajib Nasional
  - 4.2 Bagi mahasiswa angkatan 2020/2021 dan angkatan tahun sebelumnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    - 4.2.1 Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Bahasa Indonesia** berarti telah lulus mata kuliah **Bahasa Indonesia** sebagai mata kuliah wajib Universitas dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Bahasa Indonesia** sebagai mata kuliah wajib Nasional dalam Kurikulum Baru.
    - 4.2.2 Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Bahasa Indonesia** berarti wajib menempuh mata kuliah **Bahasa Indonesia** sebagai mata kuliah wajib Nasional dalam Kurikulum Baru.

## 2. MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

### 1. Kepencasilaan

- 1.1. Mata kuliah **Kepencasilaan** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah Wajib Universitas;
- 1.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun sebelumnya tidak wajib menempuh mata kuliah **Kepencasilaan** sebagai mata kuliah Wajib Universitas dalam Kurikulum Baru.

### 2. Kewirausahaan

- 2.1. Mata kuliah **Kewirausahaan** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah Kewirausahaan pada kurikulum lama;
- 2.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 2.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Kewirausahaan** berarti telah lulus mata kuliah Kewirausahaan sebagai mata kuliah pilihan;
  - 2.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Kewirausahaan** berarti tidak wajib menempuh mata kuliah Kewirausahaan sebagai mata kuliah Wajib Universitas dalam Kurikulum Baru.

### 3. *English for Academic Purpose (EAP)*

- 3.1. Mata kuliah *English for Academic Purpose* (EAP) dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Universitas;
- 3.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun sebelumnya tidak wajib menempuh mata kuliah *English for Academic Purpose* (EAP) sebagai mata kuliah Wajib Universitas dalam Kurikulum Baru.

**4. *English for Occupational Purpose (EOP)***

- 4.1. Mata kuliah *English for Occupational Purpose* (EOP) dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah Wajib Universitas;
- 4.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun sebelumnya tidak wajib menempuh mata kuliah *English for Occupational Purpose* (EOP) sebagai mata kuliah Wajib Universitas dalam Kurikulum Baru

## MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS

### MATA KULIAH WAJIB FAKULTAS

#### 1. Filsafat Ilmu

- 1.1. Mata kuliah **Filsafat Ilmu** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Fakultas.
- 1.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya, tidak wajib menempuh mata kuliah **Filsafat Ilmu** sebagai mata kuliah wajib Fakultas dalam Kurikulum Baru.

### MATA KULIAH YANG DIGABUNG

#### 1. Antropologi

Mata kuliah **Antropologi** dalam Kurikulum Baru merupakan gabungan dari mata kuliah **Ilmu Sosial dan Budaya Dasar** dan **Antropologi**

- 1.1. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1.1.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Ilmu Sosial dan Budaya Dasar** dan mata kuliah **Antropologi** berarti telah lulus mata kuliah **Ilmu Sosial dan Budaya Dasar** dan mata kuliah **Antropologi** sebagai mata kuliah wajib Fakultas dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Antropologi** dalam Kurikulum Baru.
  - 1.1.2. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Ilmu Sosial dan Budaya Dasar** berarti telah lulus mata kuliah **Ilmu Sosial dan Budaya Dasar** sebagai mata kuliah wajib Fakultas dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Antropologi** dalam Kurikulum Baru.
  - 1.1.3. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Antropologi** berarti telah lulus mata kuliah **Antropologi** sebagai mata kuliah wajib Fakultas dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Antropologi** dalam Kurikulum Baru.
  - 1.1.4. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Ilmu Sosial dan Budaya Dasar** dan/atau **Antropologi** berarti wajib menempuh mata kuliah **Antropologi** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Fakultas.

#### 2. Sosiologi Hukum

Mata kuliah **Sosiologi Hukum** dalam Kurikulum Baru merupakan gabungan dari mata kuliah **Sosiologi** dan **Sosiologi Hukum**

- 2.1. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 2.1.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Sosiologi** dan mata kuliah **Sosiologi Hukum** berarti telah lulus mata kuliah **Sosiologi** sebagai mata kuliah wajib Fakultas dan telah lulus mata kuliah **Sosiologi Hukum** sebagai mata kuliah pilihan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Sosiologi Hukum** dalam Kurikulum Baru.

- 2.1.2. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Sosiologi** berarti telah lulus mata kuliah **Sosiologi** sebagai mata kuliah wajib Fakultas dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Sosiologi Hukum** dalam Kurikulum Baru.
- 2.1.3. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Sosiologi Hukum** berarti telah lulus mata kuliah **Sosiologi Hukum** sebagai mata kuliah Pilihan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Sosiologi Hukum** dalam Kurikulum Baru.
- 2.1.4. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Sosiologi** dan/atau **Sosiologi Hukum** berarti wajib menempuh mata kuliah Sosiologi Hukum dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Fakultas.

## PROGRAM KEKHUSUSAN I

### MATA KULIAH WAJIB PROGRAM KEKHUSUSAN

#### 1. Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral

1.1. Mata kuliah **Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah **Hukum Pertambangan** dalam Kurikulum Lama.

1.2. Mata kuliah **Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan I.

1.3. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan I tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dalam Kurikulum Baru.

#### 2. Hukum Jaminan

2.1. Mata kuliah **Hukum Jaminan** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan I.

2.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan I tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Jaminan** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dalam Kurikulum Baru.

#### 3. Hukum Ekonomi Islam

3.1. Mata kuliah **Hukum Ekonomi Islam** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah **Zakat/Wakaf**

3.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan II maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

3.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Zakat/Wakaf** berarti telah lulus mata kuliah **Zakat/Wakaf** sebagai mata kuliah pilihan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Ekonomi Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

3.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Zakat/Wakaf** berarti tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Ekonomi Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

#### 4. Hukum Telematika

4.1. Mata kuliah **Hukum Telematika** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah **Hukum Siber/Cyber Law** dalam Kurikulum Lama.

4.2. Mata kuliah **Hukum Telematika** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan I.

4.3. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan I tidak wajib menempuh mata

kuliah **Hukum Telematika** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I.

## **5. Hukum Keluarga Barat**

**5.1.** Mata kuliah **Hukum Keluarga Barat** dalam kurikulum baru merupakan gabungan mata kuliah **Hukum Perkawinan** dan **Hukum Waris Perdata**.

**5.2.** Mata kuliah **Hukum Keluarga Barat** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan I.

**5.3.** Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan I maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

**5.3.1.** Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Perkawinan** dan **Hukum Waris Perdata** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Perkawinan** dan **Hukum Waris Perdata** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Barat** dalam kurikulum baru.

**5.3.2.** Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Perkawinan** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Perkawinan** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Barat** dalam kurikulum baru

**5.3.3.** Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Waris Perdata** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Waris Perdata** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Barat** dalam kurikulum baru

**5.3.4.** Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Perkawinan** dan/atau **Hukum Waris Perdata** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I maka wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Barat** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dalam kurikulum baru.

## **6. Hukum Keluarga Adat**

**6.1.** Mata kuliah **Hukum Keluarga Adat** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah **Hukum Keluarga dan Waris Adat** dalam Kurikulum Lama.

**6.2.** Mata kuliah **Hukum Keluarga Adat** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan I.

**6.3.** Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan I maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

**6.3.1.** Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Keluarga dan Waris Adat** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Keluarga dan Waris Adat** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I, dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Adat** dalam Kurikulum Baru.

**6.3.2.** Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Keluarga dan Waris Adat** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I maka

wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Adat** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dalam Kurikulum Baru.

## **7. Hukum Keluarga Islam**

**7.1.** Mata kuliah **Hukum Keluarga Islam** dalam kurikulum baru merupakan gabungan mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam** dan **Hukum Perkawinan Islam**

**7.2.** Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan I maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

**7.2.1.** Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam** dan **Hukum Perkawinan Islam** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam** dan **Hukum Perkawinan Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Islam** dalam Kurikulum Baru.

**7.2.2.** Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Islam** dalam Kurikulum Baru

**7.2.3.** Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Perkawinan Islam** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Perkawinan Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Islam** dalam Kurikulum Baru

**7.2.4.** Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam** dan/atau **Hukum Perkawinan Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I maka wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dalam Kurikulum Baru.

## **8. Hukum Peradilan Adat**

**8.1.** Mata kuliah **Hukum Peradilan Adat** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan I.

**8.2.** Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Peradilan Adat** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan I dalam Kurikulum Baru.

## **PROGRAM KEKHUSUSAN II**

### **MATA KULIAH WAJIB PROGRAM KEKHUSUSAN**

#### **1. Hukum Kepailitan**

Mata kuliah **Hukum Kepailitan** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah **Hukum Kepailitan dan Perwasitan** pada Kurikulum Lama

1.1. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan II, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1.1.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Kepailitan dan Perwasitan** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Kepailitan dan Perwasitan** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Kepailitan** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

1.1.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Kepailitan dan Perwasitan** berarti wajib menempuh mata kuliah **Hukum Kepailitan** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

#### **2. Hukum Pengangkutan**

2.1. Mata kuliah **Hukum Pengangkutan** dalam Kurikulum Baru merupakan perluasan dari mata kuliah **Hukum Pengangkutan Laut** serta gabungan dari mata kuliah **Hukum Jual Beli Perusahaan** pada Kurikulum Lama.

2.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan II, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

2.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Pengangkutan Laut** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Pengangkutan Laut** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pengangkutan** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

2.2.2. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Jual Beli Perusahaan** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Jual Beli Perusahaan** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pengangkutan** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

2.2.3. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Pengangkutan Laut** dan/atau **Hukum Jual Beli Perusahaan** berarti wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pengangkutan** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

### **3. Hukum Investasi**

3.1. Mata kuliah **Hukum Investasi** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah **Hukum Investasi dan Pembangunan**

3.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan II, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

3.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Investasi dan Pembangunan** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Investasi dan Pembangunan** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Investasi** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

3.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Investasi dan Pembangunan** berarti wajib menempuh mata kuliah **Hukum Investasi** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

### **4. Hukum Ekonomi Islam**

4.1. Mata kuliah **Hukum Ekonomi Islam** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah **Zakat/Wakaf**

4.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan II maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

4.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Zakat/Wakaf** berarti telah lulus mata kuliah **Zakat/Wakaf** sebagai mata kuliah pilihan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Ekonomi Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

4.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Zakat/Wakaf** berarti tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Ekonomi Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

### **5. Hukum Perikatan Islam**

5.1. Mata kuliah Hukum Perikatan Islam dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan II.

5.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan II, tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Perikatan Islam** sebagai mata kuliah wajib Program kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

### **6. Hukum Persaingan Usaha**

6.1. Mata kuliah **Hukum Persaingan Usaha** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan II.

6.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan II, tidak wajib menempuh mata

kuliah **Hukum Persaingan Usaha** sebagai mata kuliah wajib Program kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

**7. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa**

- 7.1. Mata kuliah **Hukum Pengadaan Barang dan Jasa** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan II.
- 7.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan II, tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pengadaan Barang dan Jasa** sebagai mata kuliah wajib Program kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

**8. Hukum Jaminan**

- 8.1. Mata kuliah **Hukum Jaminan** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan II.
- 8.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan II, tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Jaminan** sebagai mata kuliah wajib Program kekhususan II dalam Kurikulum Baru.

## PROGRAM KEKHUSUSAN III

### MATA KULIAH WAJIB PROGRAM KEKHUSUSAN

#### 1. Hukum Telematika

- 1.1. Mata kuliah **Hukum Telematika** dalam kurikulum baru sama dengan mata kuliah **Hukum Siber / Cyber Law** dalam kurikulum lama.
- 1.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program kekhususan III, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Siber/Syber Law** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Siber/Syber Law** sebagai mata kuliah Pilihan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Telematika** dalam kurikulum baru.
  - 1.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Siber/Syber Law** berarti tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Telematika** dalam kurikulum baru.

#### 2. Hukum Pidana Khusus

- 2.1. Mata kuliah **Hukum Pidana Khusus** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah perluasan dari mata kuliah **Tindak Pidana Khusus** dalam kurikulum lama
- 2.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan III maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 2.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Tindak Pidana Khusus** berarti telah lulus mata kuliah **Tindak Pidana Khusus** sebagai mata kuliah wajib program kekhususan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pidana Khusus** dalam kurikulum baru.
  - 2.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Tindak Pidana Khusus** berarti wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pidana Khusus** dalam kurikulum baru.

#### 3. Hukum Pidana Transnasional

- 3.1. Mata kuliah Hukum **Pidana Transnasional** dalam Kurikulum Baru merupakan pecahan dari mata kuliah **Penegakan Hukum Pidana Nasional dan Internasional** dalam kurikulum lama.
- 3.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan III maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 3.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Penegakan Hukum Pidana Nasional dan Internasional** berarti telah lulus mata kuliah **Penegakan Hukum Pidana Nasional dan Internasional** sebagai mata kuliah wajib program kekhususan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pidana Transnasional** dalam kurikulum baru.

- 3.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Penegakan Hukum Pidana Nasional dan Internasional** berarti wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pidana Transnasional** dalam kurikulum baru.

#### 4. **Hukum Pidana Internasional**

- 4.1. Mata kuliah **Hukum Pidana Internasional** dalam Kurikulum Baru merupakan pecahan dari mata kuliah **Penegakan Hukum Pidana Nasional dan Internasional** adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan III.
- 4.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan III maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 4.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Penegakan Hukum Pidana Nasional dan Internasional** berarti telah lulus mata kuliah **Penegakan Hukum Pidana Nasional dan Internasional** sebagai mata kuliah wajib program kekhususan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pidana Internasional** dalam kurikulum baru.
- 4.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Penegakan Hukum Pidana Nasional dan Internasional** berarti wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pidana Internasional** dalam kurikulum baru.

#### 5. **Penyelesaian Sengketa Internasional**

- 5.1. Mata kuliah **Penyelesaian Sengketa Internasional** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan III.
- 5.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan III, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Penyelesaian Sengketa Internasional** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan III.

#### 6. **Hukum Peradilan Militer**

- 6.1. Mata kuliah **Hukum Peradilan Militer** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan III.
- 6.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan III, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Peradilan Militer** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan III.

#### 7. **Hukum Pemilu & Partai Politik**

- 7.1. Mata kuliah **Hukum Pemilu & Partai Politik** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan III.
- 7.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan III, maka tidak

wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pemilu & Partai Politik** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan III

## Program Kekhususan IV

### MATA KULIAH WAJIB PROGRAM KEKHUSUSAN

#### 1. Hukum Keluarga Barat

- 1.1. Mata kuliah **Hukum Keluarga Barat** dalam Kurikulum Baru merupakan gabungan dari mata kuliah **Hukum Perkawinan** dan **Hukum Waris Perdata**
- 1.2. Mata kuliah **Hukum Keluarga Barat** dalam kurikulum baru merupakan gabungan mata kuliah **Hukum Perkawinan** dan **Hukum Waris Perdata**
- 1.3. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - 1.3.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Perkawinan** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Perkawinan** sebagai mata kuliah pilihan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Barat** dalam kurikulum baru
  - 1.3.2. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Waris Perdata** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Waris Perdata** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Barat** dalam kurikulum baru.
  - 1.3.3. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Waris Perdata** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV maka diwajibkan menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Barat** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV dalam kurikulum baru.

#### 2. Hukum Keluarga Adat

- 2.1. Mata kuliah **Hukum Keluarga Adat** dalam kurikulum baru sama dengan matakuliah **Hukum Keluarga & Waris Adat** dalam kurikulum lama.
- 2.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 2.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Keluarga & Waris Adat** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Keluarga & Waris Adat** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Adat** dalam Kurikulum Baru.
  - 2.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Keluarga & Waris Adat** berarti wajib menempuh **Hukum Keluarga Adat** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV.

#### 3. Hukum Keluarga Islam

- 3.1. Mata kuliah **Hukum Keluarga Islam** dalam kurikulum baru merupakan gabungan mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam** dan **Hukum Perkawinan Islam**

3.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

3.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perkawinan Islam** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perkawinan Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Islam** dalam kurikulum baru.

3.2.2. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Islam** dalam kurikulum baru

3.2.3. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Perkawinan Islam** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Perkawinan Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Islam** dalam kurikulum baru

3.2.4. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Kewarisan Islam** dan/atau **Hukum Perkawinan Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV maka diwajibkan menempuh mata kuliah **Hukum Keluarga Islam** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV dalam kurikulum baru.

#### 4. **Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)**

4.1. Mata kuliah **Hukum Kekayaan Intelektual** dalam kurikulum baru sama dengan matakuliah **Hukum HAKI** dalam kurikulum lama.

4.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

4.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum HAKI** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum HAKI** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)** dalam Kurikulum Baru.

4.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum HAKI** berarti diwajibkan menempuh **Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV.

#### 5. **Hukum Ekonomi Islam**

5.1. Mata kuliah **Hukum Ekonomi Islam** dalam kurikulum baru sama dengan matakuliah **Zakat/Wakaf** dalam kurikulum lama.

5.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 5.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Zakat/Wakaf** berarti telah lulus mata kuliah **Zakat/Wakaf** sebagai mata kuliah Pilihan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Ekonomi Islam** dalam kurikulum baru sebagai mata kuliah wajib program kekhususan IV.
- 5.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Zakat/Wakaf** berarti tidak wajib menempuh matakuliah **Hukum Ekonomi Islam** dalam kurikulum baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV.

## **6. Hukum Pidana Khusus**

- 6.1. Mata kuliah **Hukum Pidana Khusus** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah perluasan dari mata kuliah **Tindak Pidana Khusus** dalam kurikulum lama
- 6.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 6.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Tindak Pidana Khusus** berarti telah lulus mata kuliah **Tindak Pidana Khusus** sebagai mata kuliah wajib program kekhususan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pidana Khusus** dalam kurikulum baru.
  - 6.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Tindak Pidana Khusus** berarti wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pidana Khusus** dalam kurikulum baru.

## **7. Hukum Peradilan Militer**

- 7.1. Mata kuliah **Hukum Peradilan Militer** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan IV.
- 7.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV, tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Peradilan Militer** sebagai mata kuliah wajib Program kekhususan dalam Kurikulum Baru.

## **8. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

- 8.1. Mata kuliah **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan IV.
- 8.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV, tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi** sebagai mata kuliah wajib Program kekhususan dalam Kurikulum Baru.

## **9. Penyelesaian Sengketa Internasional**

- 9.1. Mata kuliah **Penyelesaian Sengketa Internasional** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan IV.
- 9.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV, tidak wajib menempuh mata

kuliah **Penyelesaian Sengketa Internasional** sebagai mata kuliah wajib Program kekhususan dalam Kurikulum Baru.

#### **10. Hukum Persaingan Usaha**

**10.1.** Mata kuliah **Hukum Persaingan Usaha** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan IV.

**10.2.** Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV, tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Persaingan Usaha** sebagai mata kuliah wajib Program kekhususan dalam Kurikulum Baru.

#### **11. Hukum Pemilu dan Partai Politik**

**11.1.** Mata kuliah **Hukum Pemilu dan Partai Politik** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan IV.

**11.2.** Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV, tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pemilu dan Partai Politik** sebagai mata kuliah wajib Program kekhususan dalam Kurikulum Baru.

#### **12. Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha**

**12.1.** Mata kuliah **Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan IV.

**12.2.** Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV, tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha** sebagai mata kuliah wajib Program kekhususan dalam Kurikulum Baru.

#### **13. Hukum Kontrak Internasional**

**13.1.** Mata kuliah **Hukum Kontrak Internasional** dalam kurikulum baru sama dengan mata kuliah Hukum Kontrak Internasional dalam kurikulum lama.

**13.2.** Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan IV maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

**13.2.1.** Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Hukum Kontrak Internasional berarti telah lulus mata kuliah Hukum Kontrak Internasional sebagai mata kuliah Pilihan dan tidak wajib menempuh mata kuliah Hukum Kontrak Internasional dalam kurikulum baru sebagai mata kuliah wajib program kekhususan IV.

**13.2.2.** Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah Hukum Kontrak Internasional berarti tidak wajib menempuh matakuliah Hukum

*Lampiran Keputusan Dekan Nomor : 992 /Kep/D/FH/VIII/2021*

Kontrak Internasional dalam kurikulum baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan IV.

## **PROGRAM KEKHUSUSAN V**

### **MATA KULIAH WAJIB PROGRAM KEKHUSUSAN**

#### **1. Hukum HAM**

- 1.1. Mata kuliah **Hukum HAM** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan V
- 1.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan V, tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum HAM** sebagai mata kuliah wajib Program kekhususan dalam Kurikulum Baru.

#### **2. Hukum dan Teori Konstitusi**

- 2.1. Mata kuliah **Hukum dan Teori Konstitusi** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan V.
- 2.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan V, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum dan Teori Konstitusi** dalam Kurikulum Baru.

#### **3. Hukum Bangunan Gedung dan Perumahan**

- 3.1. Mata kuliah **Hukum Bangunan Gedung dan Perumahan** merupakan perluasan dari mata kuliah **Kondominium** dalam kurikulum lama.
- 3.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan V maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 3.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Kondominium** berarti telah lulus mata kuliah **Kondominium** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan V dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Bangunan Gedung dan Perumahan** dalam kurikulum baru.
  - 3.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Kondominium** berarti diwajibkan menempuh mata kuliah **Hukum Bangunan Gedung dan Perumahan** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan V dalam kurikulum baru.

#### **4. Hukum Birokrasi & Pelayanan Publik**

- 4.1. Mata kuliah **Hukum Birokrasi & Pelayanan Publik** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan V.
- 4.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan V, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Birokrasi & Pelayanan Publik** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan V.

**5. Hukum Pengadaan Barang & Jasa**

- 5.1. Mata kuliah **Hukum Pengadaan Barang & Jasa** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan V.
- 5.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan V, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pengadaan Barang & Jasa** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan V.

**6. Hukum Pemilu & Partai Politik**

- 6.1. Mata kuliah **Hukum Pemilu & Partai Politik** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan V.
- 6.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan V, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pemilu & Partai Politik** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan V.

**7. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**

- 7.1. Mata kuliah **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan V.
- 7.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan V, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan V.

**8. Hukum Imigrasi**

- 8.1. Mata kuliah **Hukum Imigrasi** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan V.
- 8.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan V, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Imigrasi** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan V.

**9. Hukum Perijinan & Kemudahan Berusaha**

- 9.1. Mata kuliah **Hukum Perijinan & Kemudahan Berusaha** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan V.
- 9.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan V, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Perijinan & Kemudahan Berusaha** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan V.

## PROGRAM KEKHUSUSAN VI

### MATA KULIAH WAJIB PROGRAM KEKHUSUSAN

#### 1. Hukum Humaniter

- 1.1. Mata kuliah **Hukum Humaniter** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah **Hukum Humaniter dan HAM** dalam kurikulum lama.
- 1.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan VI maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Humaniter dan HAM** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Humaniter dan HAM** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Humaniter** dalam kurikulum baru.
  - 1.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Humaniter dan HAM** berarti wajib menempuh mata kuliah **Hukum Humaniter dan HAM** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dalam kurikulum baru.

#### 2. Hukum Ekonomi Internasional

- 2.1. Mata kuliah **Hukum Ekonomi Internasional** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan VI.
- 2.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan VI, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Ekonomi Internasional** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI.

#### 3. Hukum Perdata Internasional

- 3.1. Mata kuliah **Hukum Perdata Internasional** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah **Hukum Antar Tata Hukum** dalam kurikulum lama.
- 3.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih PK VI maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 3.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Antar Tata Hukum** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Antar Tata Hukum** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Perdata Internasional** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dalam Kurikulum Baru.
  - 3.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata **Hukum Antar Tata Hukum** berarti diwajibkan menempuh mata kuliah **Hukum Perdata Internasional** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dalam Kurikulum Baru.

#### 4. Hukum HAM

- 4.1. Mata kuliah **Hukum HAM** dalam Kurikulum Baru merupakan mata kuliah wajib Program Kekhususan VI

- 4.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan VI, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum HAM** dalam Kurikulum Baru sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI.

#### **5. Penyelesaian Sengketa Internasional**

- 5.1. Mata kuliah **Penyelesaian Sengketa Internasional** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan VI.
- 5.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan VI, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Penyelesaian Sengketa Internasional** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dalam Kurikulum Baru

#### **6. Hukum Energi & Sumber Daya Mineral**

- 6.1. Mata kuliah **Hukum Energi & Sumber Daya Mineral** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah **Hukum Pertambangan** dalam kurikulum lama.
- 6.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan VI maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 6.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Hukum Pertambangan** berarti telah lulus mata kuliah **Hukum Pertambangan** sebagai mata kuliah Pilihan dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Energi & Sumber Daya Mineral** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dalam kurikulum baru.
- 6.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Hukum Pertambangan** berarti tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Energi & Sumber Daya Mineral** sebagai mata kuliah Wajib Program Kekhususan VI dalam Kurikulum Baru.

#### **7. Hukum Pengungsi**

- 7.1. Mata kuliah **Hukum Pengungsi** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan VI.
- 7.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan VI, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Pengungsi** sebagai mata kuliah Wajib Program Kekhususan VI dalam Kurikulum Baru.

#### **8. Hukum Perlindungan Buruh Migran**

- 8.1. Mata kuliah **Hukum Perlindungan Buruh Migran** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan VI.
- 8.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan VI, maka tidak

wajib menempuh mata kuliah Hukum **Perlindungan Buruh Migran** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dalam Kurikulum Baru.

**9. ASEAN Mechanism in Law**

- 9.1. Mata kuliah **ASEAN Mechanism in Law** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Konsentrasi VI.
- 9.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan VI, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **ASEAN Mechanism in Law** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dalam Kurikulum Baru

**10. Hukum Perdagangan Internasional**

- 10.1. Mata kuliah Hukum **Perdagangan Internasional** dalam Kurikulum Baru adalah mata kuliah wajib Program Kekhususan VI.
- 10.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan VI, maka tidak wajib menempuh mata kuliah **Hukum Perdagangan Internasional** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dalam Kurikulum Baru.

**11. Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional**

- 11.1. Mata kuliah **Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional** dalam Kurikulum Baru sama dengan mata kuliah **Konvensi & Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional** dalam kurikulum lama.
- 11.2. Bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2020/2021 dan angkatan tahun akademik sebelumnya yang memilih Program Kekhususan VI maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 11.2.1. Bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah **Konvensi & Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional** berarti telah lulus mata kuliah **Konvensi & Kapita Selektta HPI** sebagai mata kuliah wajib program kekhususan VI dan tidak wajib menempuh mata kuliah **Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dalam Kurikulum Baru.
  - 11.2.2. Bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah **Konvensi & Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional** berarti diwajibkan menempuh mata kuliah **Kapita Selektta Hukum Perdata Internasional** sebagai mata kuliah wajib Program Kekhususan VI dalam Kurikulum Baru.

**MATA KULIAH BARU DALAM KURIKULUM BARU**

1. Filsafat Ilmu
2. Hukum dan Teori Konstitusi
3. Hukum Ekonomi Internasional
4. Hukum HAM
5. Hukum Keluarga Barat
6. Hukum Keluarga Islam
7. Hukum Kepailitan
8. Hukum Ketenagakerjaan
9. Hukum Perikatan Islam
10. *English for Occapational Purpose* (EOP)
11. *English for Academic Purpose* (EAP)
12. Hukum Birokrasi dan Pelayanan Publik
13. Hukum Ekonomi Islam
14. Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral
15. Hukum Investasi
16. Hukum Jaminan
17. Hukum Konstruksi dan Bangunan Gedung
18. Hukum Peradilan Adat
19. Hukum Persaingan Usaha
20. Kapita Selekt HPI
21. Hukum Humaniter
22. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)
23. Hukum Pengangkutan
24. Hukum Perdata Internasional
25. Hukum Pidana Internasional
26. Hukum Pidana Khusus
27. Hukum Pidana Transnasional
28. Hukum Telematika
29. Kepancasilaan
30. Alternatif Penyelesaian Sengketa
31. ASEAN Mechanism Law
32. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
33. Hukum Imigrasi
34. Hukum Pemilu dan Partai Politik
35. Hukum Pengadaan Barang dan Jasa
36. Hukum Pengungsi
37. Hukum Peradilan Militer
38. Hukum Perdagangan Internasional
39. Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha
40. Hukum Perlindungan Buruh Migran
41. Penyelesaian Sengketa Internasional

**MATA KULIAH YANG BERUBAH JUDUL**

1. Hukum Antar Tata Hukum menjadi Hukum Perdata Internasional
2. Hukum Perburuhan menjadi Hukum Ketenagakerjaan
3. Hukum Investasi dan Pembangunan menjadi Hukum Investasi
4. Hukum Pengangkutan Laut menjadi Hukum Pengangkutan
5. Zakat/Wakaf menjadi Hukum Ekonomi Islam
6. Tindak Pidana Khusus menjadi Hukum Pidana Khusus
7. Hukum Kewarganegaraan dan HAM menjadi Hukum HAM
8. Hukum Keluarga dan Waris Adat menjadi Hukum Keluarga Adat
9. Hukum Kepailitan dan Perwasitan menjadi Hukum Kepailitan
10. Hukum Pertambangan menjadi Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Kondominium menjadi Hukum Bangunan Gedung dan Perumahan
12. Hukum Humaniter dan HAM menjadi Hukum Humaniter
13. Hukum HAKI menjadi Hukum Kekayaan Intelektual (HKI)
14. Hukum Siber/Cyber Law menjadi Hukum Telematika

**MATA KULIAH YANG BERUBAH SKS**

1. Hukum Kepailitan dan Perwasitan yang berubah judul menjadi Hukum Kepailitan, dari 3 sks menjadi 2 sks.
2. Hukum Anggaran dan Keuangan Publik dari 3 sks menjadi 2 sks
3. Hukum Humaniter dan HAM yang berubah judul menjadi Hukum Humaniter dari 3 sks menjadi 2 sks
4. Hukum Organisasi Internasional dari 3 sks menjadi 2 sks
5. Hukum Pengangkutan Laut yang berubah judul menjadi Hukum Pengangkutan dari 3 sks menjadi 2 sks
6. Hukum Antar Tata Hukum yang berubah judul menjadi Hukum Perdata Internasional dari 3 sks menjadi 2 sks
7. Hukum Perusahaan dan Koperasi dari 3 sks menjadi 2 sks
8. Tindak Pidana Khusus yang berubah judul menjadi Hukum Pidana Khusus dari 2 sks menjadi 3 sks
9. Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa dari 3 sks menjadi 2 sks

**MATA KULIAH YANG PINDAH SEMESTER**

1. Antropologi dari Semester 2 menjadi Semester 1
2. Sosiologi Hukum dari Semester 2 menjadi Semester 1
3. Pengantar Hukum Indonesia dari Semester 2 menjadi Semester 1
4. Hukum Internasional dari Semester 4 menjadi Semester 3
5. Hukum Dagang dari Semester 4 menjadi Semester 3
6. Hukum Perburuhan yang berubah menjadi Hukum Ketenagakerjaan, dari Semester 4 menjadi Semester 3
7. Hukum Agraria dari Semester 4 menjadi Semester 3
8. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dari Semester 4 menjadi Semester 3
9. Kewirausahaan dari Semester 2 menjadi Semester 5

10. Hukum Pajak dari Semester 4 menjadi Semester 3
11. Hukum Asuransi dari Semester 5 menjadi Semester 4
12. Hukum Surat Berharga dari Semester 5 menjadi Semester 4
13. Hukum Hak Kekayaan Intelektual dari Semester 7 menjadi Semester 4
14. Hukum Perusahaan dan Koperasi dari Semester 7 menjadi Semester 4

#### **MATA KULIAH YANG BERUBAH STATUS**

1. Pancasila dari mata kuliah Wajib Universitas menjadi mata kuliah Wajib Nasional
2. Agama dari mata kuliah Wajib Universitas menjadi mata kuliah Wajib Nasional
3. Bahasa Indonesia dari mata kuliah Wajib Universitas menjadi mata kuliah Wajib Nasional
4. Kewarganegaraan dari mata kuliah Wajib Universitas menjadi mata kuliah Wajib Nasional
5. Kewirausahaan dari mata kuliah Pilihan menjadi mata kuliah Wajib Universitas
6. Zakat/Wakaf yang berubah judul menjadi Hukum Ekonomi Islam dari mata kuliah pilihan menjadi mata kuliah wajib Program Kekhususan I, II, dan IV
7. Hukum Pertambangan yang berubah judul menjadi Hukum Energi dan Sumber daya Mineral dari mata kuliah Pilihan menjadi mata kuliah Wajib Program Kekhususan I dan VI
8. Hukum Kontrak Internasional dari mata kuliah Wajib Program Kekhususan VI menjadi mata kuliah Wajib Program Kekhususan IV dan VI
9. Kapita Selekta Hukum Perdata dari mata kuliah Pilihan menjadi mata kuliah Wajib Program Kekhususan I dan II
10. Kapita Selekta Hukum Pidana dari mata kuliah Pilihan menjadi mata kuliah Wajib Program Kekhususan III dan IV
11. Perbandingan Hukum Perdata dari mata kuliah Wajib Program Kekhususan I menjadi mata kuliah Wajib Program Kekhususan I dan II
12. Bahasa Inggris Hukum dari mata kuliah wajib Program Kekhususan VI menjadi mata kuliah pilihan

#### **MATA KULIAH PILIHAN**

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa

#### **MATA KULIAH YANG TIDAK TERCANTUM DALAM KURIKULUM BARU**

1. Bahasa Belanda Hukum
2. Sosiologi
3. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
4. Hukum Perkawinan Islam
5. Hukum Kewarisan Islam
6. Hukum Perikatan Adat
7. Hukum Keluarga dan Waris Adat
8. Hukum Waris Perdata

9. Hukum Perkawinan
10. Zakat/Wakaf
11. Ekonomi dan Pembangunan
12. Hukum Investasi dan Pembangunan
13. Konvensi dan Kapita Selekta HPI
14. Filsafat Pancasila
15. Kondominium
16. Hukum Perburuhan
17. Ilmu Kealaman Dasar
18. Hukum Humaniter dan HAM
19. Tindak Pidana Khusus
20. Hukum Antar Tata Hukum
21. Hukum HAKI
22. Hukum Siber/Cyber Law
23. Hukum Pengangkutan Laut
24. Hukum Investasi dan Pembangunan
25. Hukum Jual Beli Perusahaan
26. Hukum Kewarganegaraan dan HAM
27. Penegakan Hukum Pidana Nasional dan Internasional